



MASALAH SOSIAL DAN PERLAWANAN SIPIL

Oleh Kelompok 6

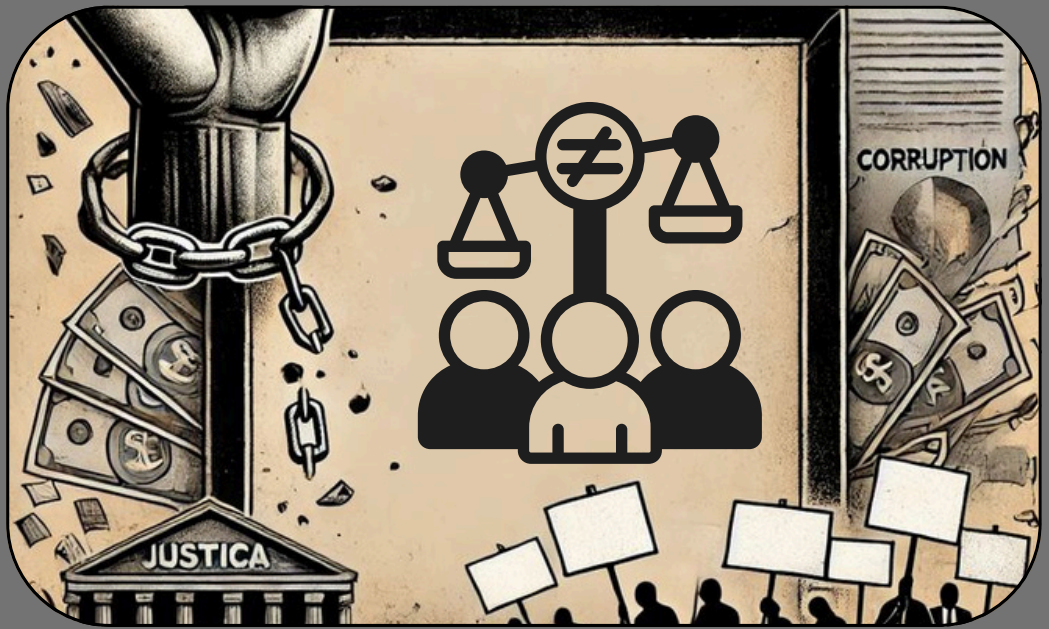


PENDAHULUAN



MASALAH SOSIAL LAHIR DARI INTERAKSI TIDAK SELARAS DALAM MASYARAKAT YANG DIPICU OLEH KETIMPANGAN STRUKTURAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG TIDAK ADIL. KETIKA SALURAN ASPIRASI FORMAL BUNTU ATAU TIDAK LAGI REPRESENTATIF, MASYARAKAT AKAN MENGAMBIL JALUR DI LUAR INSTITUSI NEGARA MELALUI PERLAWANAN SIPIL (CIVIL RESISTANCE). GERAKAN INI MERUPAKAN RANGKAIAN TAKTIK DISRUPSI NON-KEKERASAN UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK DAN KEADILAN DEMI MENGISI KERETAKAN HUBUNGAN (BROKEN LINKAGE) ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT. ADAPUN TIGA ASAS KUNCI YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN GERAKAN SIPIL INI ADALAH PERSATUAN, PERENCANAAN YANG MATANG, SERTA KEDISIPLINAN TANPA KEKERASAN.





MASALAH SOSIAL MERUPAKAN KONDISI YANG TIDAK DIINGINKAN ADA DI DALAM MASYARAKAT KARENA DAPAT MENGGANGGU KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DIPERLUKAN ADANYA TINDAKAN SEBAGAI HASIL DARI KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK MENGATASINYA. MASALAH SOSIAL DIANGGAP SEBAGAI PERSOALAN KARENA MEMUAT TATA KELAKUAN YANG BERSIFAT IMMORAL, BERLAWANAN ARAH DENGAN HUKUM YANG BERSIFAT MERUSAK. MASALAH SOSIAL TIDAK AKAN MUNGKIN DITELAAH TANPA MEMPERTIMBANGKAN UKURAN-UKURAN MASYARAKAT MENGENAI APA YANG DIANGGAP BAIK DAN APA YANG DIANGGAP BURUK.



FAKTOR PENYEBAB MASALAH SOSIAL



- Faktor Ekonomi, Faktor ini biasa kaitkan dengan pendapatan individu yang dapat mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun pendidikan dapat mendorong munculnya masalah sosial

- Faktor Budaya: kebudayaan ini juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab arena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat multikultural.

- Faktor Biologis: Faktor ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis dalam masyarakat. Kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan sulitnya akses pendidikan maupun ekonomi juga menjadi faktor pendukung terjadinya masalah sosial

- Faktor Psikologis: Faktor psikologis ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat atau anggota masyarakat yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial.





JENIS-JENIS MASALAH SOSIAL

- **KEMISKINAN:** KETIDAKSANGGUPAN MEMENUHI TARAF HIDUP MINIMAL. DIBEDAKAN MENJADI MISKIN BUDAYA (KETERBATASAN PENGETAHUAN/KREATIVITAS) DAN BUDAYA MISKIN (ETOS KERJA RENDAH/MALAS).
- **KRIMINALITAS:** KEJAHATAN YANG DIPICU OLEH KEKECEWAAN, LEMAHNYA PENGENDALIAN SOSIAL, ATAU ADANYA KESEMPATAN.
- **DISORGANISASI KELUARGA:** PERPECAHAN UNIT KELUARGA AKIBAT KEGAGALAN PEMENUHAN PERAN (MISAL: PERCERAIAN ATAU KRISIS KOMUNIKASI).
- **PEPERANGAN:** MASALAH LINTAS NEGARA YANG MERUSAK SELURUH ASPEK KEMASYARAKATAN.
- **PELANGGARAN NORMA:** PERILAKU YANG MERUSAK MORAL DAN MENGANGGU KETENTERAMAN, SEPERTI PELACURAN, DELINQUENSI ANAK (KENAKALAN REMAJA), DAN ALKOHOLISME.
- **KEPENDUDUKAN & LINGKUNGAN:** LEDAKAN PENDUDUK MEMICU KELANGKAAN EKONOMI, YANG BERKELINDAN DENGAN ISU LINGKUNGAN AKIBAT URBANISASI DAN LIMBAH IPTEK.



APA ITU?



PERLAWANAN

SIPIL



(CIVIL RESISTANCE)

CIVIL RESISTANCE
MERUPAKAN SEBUAH
PENENTANGAN YANG JUGA
MENCAKUP TINDAKAN NON-
KEKERASAN TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH.
PERLAWANAN DALAM HAL INI
BUKAN MENJADI
PERLAWANAN ANTI NEGARA,
MELAINKAN CIVIL
RESISTANCE DALAM
MEMPERJUANGKAN HAK,
KEBEBASAN, DAN Keadilan
Masyarakat TANPA
MENGUNAKAN KEKERASAN.



CIVIL RESISTANCE MEMILIKI TIGA
ASAS KUNCI KEBERHASILAN
PERGERAKAN, YAITU
PERSATUAN, PERENCANAAN,
DAN DISIPLIN TANPA
KEKERASAN. PENCAPAIAN ATAS
TIGA ASAS TERSEBUT DIPERKUAT
DENGAN ADANYA TUJUAN SAMA
YANG HENDAK DICAPAI DENGAN
MELIBATKAN KOMITMEN
BERSAMA. SALAH SATU FAKTOR
PENYEBAB TERJADINYA
PERLAWANAN SIPIL ADALAH
KETIDAKPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH.

Civil resistance

RUU TNI (MARE 2025)

KRONOLOGI SKANDAL



SEBUAH STUDI KASUS TENTANG BAGAIMANA DEMOKRASI DELIBERATIF DIBUNUH SECARA PERLAHAN.

Kamis, 20 Maret 2025 menjadi hari yang sangat panas di depan Gedung DPR RI ketika ribuan mahasiswa, buruh, dan kalangan profesional memilih turun ke jalan untuk menolak pengesahan RUU TNI. Situasi kian memanas karena di hari yang sama, DPR justru tetap menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan regulasi tersebut seolah menutup mata dari suara penolakan rakyat. Keresahan publik ini didorong oleh kekhawatiran besar akan potensi kembalinya dwifungsi TNI seperti era Orde Baru, di mana militer dinilai membuka celah lebar untuk masuk dan mengelola sektor kehidupan sipil serta politik. Dalam aksi massa tersebut, para demonstran membawa 7 tuntutan tegas, di antaranya menolak pengesahan RUU TNI secara keseluruhan, menolak perluasan kewenangan militer di sektor sipil, mendesak TNI kembali ke barak, mendesak pemerintah menerbitkan Perppu pembatalan, serta mengecam segala bentuk tindakan intimidasi terhadap jurnalis.



***ANALIS
KASUS
MASALAH
SOSIAL DAN
PERLAWANA
N SIPIL DI
INDONESIA***



DATA SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) DRONE EMPRIT (PERIODE 11-17 MARET 2025)

Analisis Kasus Masalah Sosial dan Perlawanan Sipil di Indonesia (RUU TNI 2025).

Revisi UU TNI yang disahkan pada Maret 2025 menimbulkan penolakan luas karena proses pembahasannya dianggap tidak transparan, minim partisipasi publik, dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI melalui keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil.

Mayoritas masyarakat di media sosial menolak revisi ini, dengan 81% sentimen negatif menurut analisis Drone Emprit. Meskipun mendapat banyak kritik dan demonstrasi di berbagai kota, UU TNI tetap disahkan pada 20 Maret 2025.

Kasus ini menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pembuatan kebijakan.





KESIMPULAN

Perlawanan Selama ketimpangan struktural dipelihara dan suara rakyat disumbat, perlawanan sipil akan selalu lahir menjadi antitesis kekuasaan. Kasus Maret 2025 membuktikan bahwa gerakan rakyat sipil tidak boleh bergerak dengan kemarahan kosong. Keberhasilan menuntut keadilan mutlak membutuhkan Persatuan kelompok, erencanaan taktik yang matang, serta Kedisiplinan ketat untuk menjaga aksi tetap berada di koridor tanpa kekerasan. Pesan untuk Penguasa Sebuah kebijakan negara tidak akan pernah memiliki legitimasi yang kuat jika ruang komunikasi publik ditutup rapat. Demokrasi deliberatif (musyawarah yang transparan) bukan opsi, melainkan syarat mutlak keutuhan bernegara.

